

**MANAJEMEN SINERGIS PESANTREN-MADRASAH DI ERA
MODERN SEBAGAI ALTERNATIF PENDIDIKAN ISLAM
INDONESIA**

***SYNERGIC MANAGEMENT OF PESANTREN-MADRASA IN THE
MODERN ERA AS AN ALTERNATIVE OF INDONESIAN ISLAMIC
EDUCATION***

Amin Maghfuri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: maghfuri7393@gmail.com

Abstrak

Keberadaan madrasah atau sekolah berbasis di pesantren terkesan sebagai institusi yang berdiri dan memiliki semangat (ruh) yang berbeda dengan pesantren. Kalaupun kedua lembaga ini dapat bersinergi secara positif, tetap dimungkinkan untuk menghasilkan output yang lebih berkualitas. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam peluang sinergi sistem pendidikan Islam antara pesantren dan madrasah agar menjadi lembaga pendidikan yang lebih efektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menitikberatkan pada studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peluang untuk mensinergikan pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan alternatif sangat luas mengingat sistem pendidikan yang berjalan di antara keduanya pada umumnya masih terpisah. Langkah ini dapat dimulai dengan memadukan manajemen ke dalam sistem integral, menerapkan kurikulum integral dan mengevaluasi secara komprehensif.

Kata kunci: pendidikan Islam, pesantren, madrasah, lembaga sinergis

Abstract

The existence of madrasa or school based in pesantren has been impressed as an institution that stands and has a spirit (ruh) that is different from the pesantren. Even if these two institutions can synergize positively, it is possible to produce better quality output. This research is intended to examine in depth the opportunities to synergize the Islamic education system between pesantren and madrasas in order to become more effective educational institutions. This research is qualitative research with emphasis on the study of literature. The results of this study indicate that the opportunity to synergize pesantren and madrasas as alternative educational institutions is very wide considering the education system that runs between the two is generally still separate. This step can be started by uniting management into an integral system, implementing an integral curriculum and evaluating comprehensively.

Keywords: Islamic education, pesantren, madrasa, synergic institutions

A. Pendahuluan

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang paling asli dan paling tua di Indonesia.¹ Keberadaannya memberi warna berbeda pada sejarah pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan Islam. Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang sudah eksis sebelum kemerdekaan diraih, bahkan pesantren dipercaya menjadi tempat lahirnya semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Pasca-kemerdekaan, pesantren tetap masih eksis dengan berbagai dinamikanya, dan bahkan pesantren mampu menjawab anggapan-anggapan negatif tentang daya tahannya (*resistence*) dalam menghadapi dunia modern dengan tetap eksis dan terus berkembang.

Survive-nya pesantren sampai sekarang ini tidak lepas dari kemauan dan kemampuannya menyesuaikan dengan tuntutan zaman, dengan memodernisasi hampir seluruh aspek yang ada dalam pesantren. Namun demikian, dinamika yang terjadi di dalam pesantren selama ini – masih – tidak lepas dari anggapan-anggapan miring serta pro dan kontra terkait keberadaan pesantren. Meski sebagian besar sudah mulai menyadari peran serta pesantren – serta madrasah sebagai hasil modernisasinya – dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, namun anggapan konservatif maupun tradisional masih selalu disematkan kepada pesantren. Barangkali memang pesantren dan juga madrasah belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat ketika disandingkan dengan hal-hal yang berbau modern, meskipun proses modernisasi di pesantren khususnya sudah banyak berjalan dan masih terus berjalan.

Salah satu bentuk nyata dari proses modernisasi dalam tubuh pesantren yaitu dengan lahirnya madrasah-madrasah di lingkungan pesantren yang selain mengajarkan ilmu agama, juga telah mengakomodasi ilmu-ilmu umum di dalamnya. Meskipun untuk sampai pada taraf setara dengan sekolah umum negeri yang mendapat pengakuan pemerintah perlu waktu yang cukup lama, namun keberadaan madrasah ini tetap merupakan bukti nyata dari sebuah proses modernisasi pesantren. Tahap demi tahap dan dinamika yang dilalui pesantren hingga akhirnya diakui pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri menggambarkan betapa proses modernisasi pesantren dengan madrasah sebagai kepanjangan tangannya terus berjalan.

Proses modernisasi pesantren yang pada akhirnya melahirkan madrasah untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman merupakan bukti bahwa pesantren bukanlah

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), 7.

lembaga yang anti terhadap perkembangan. Modernisasi tersebut paling tidak dipengaruhi oleh dua hal, yaitu sebagai akibat dari pembaharuan-pembaharuan yang terjadi di dunia Islam dan respon terhadap semakin meluasnya pendidikan umum yang dibuat oleh Belanda.² Faktor pertama mengindikasikan adanya kesadaran dalam diri umat muslim sendiri – dalam hal ini pesantren – akan perlunya inovasi-inovasi dalam pendidikan Islam seiring perkembangan zaman. Sedangkan faktor kedua merupakan usaha dari kalangan pesantren untuk meminimalisir merebaknya pendidikan sekuler yang dilancarkan oleh pemerintah Belanda.

Meskipun demikian, pada dasarnya pengembangan yang dilakukan pesantren ini diawali dengan dilema yang mendalam.³ Pesantren, yang *notabenenya* adalah lembaga pendidikan Islam – dalam artian sempit – yang mengajarkan pengetahuan keagamaan *an sich* diharuskan untuk memasukkan pengetahuan umum yang bahkan pernah dihindarinya. Dilema yang menyelimuti pesantren tersebut antara mempertahankan identitas kesejarahan sebagai lembaga pencetak ulama dan *faqih* (orang yang menguasai hukum fiqih) atau mengikuti tuntutan modernisasi dengan memasukkan pendidikan non-keagamaan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Pada akhirnya secara gradual dan kontinyu, pesantren menerima “tekanan” modernisasi tersebut dengan mendirikan madrasah yang mewakili lembaga pesantren yang juga mengajarkan pendidikan non-keagamaan. Sampai pada hari ini, hampir semua pesantren tradisional yang dulunya dianggap anti terhadap kemajuan sudah memiliki lembaga yang mengajarkan pendidikan umum untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam bentuk madrasah, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), maupun Madrasah Aliyah (MA), dan bahkan sudah ada beberapa yang mendirikan Penguruan Tinggi (PT).

Kecenderungan untuk mengikuti *mainstream* yang sesungguhnya diawali dengan dilema tersebut mulai menampakkan apa yang dulunya dikhawatirkan. Perubahan besar-besaran yang dilakukan pesantren secara tidak langsung mengubah pula orientasi pesantren, juga pandangan masyarakat tentang pesantren. Keberadaan lembaga pendidikan Islam yang juga mengajarkan pengetahuan umum – dalam hal ini madrasah – di satu sisi memang mampu menutupi lubang kelemahan yang dimiliki

²Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 81-82.

³Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 219.

pesantren serta mampu memenuhi ekspektasi masyarakat tentang lulusan yang siap kerja, meskipun skalanya masih belum maksimal. Namun di sisi lain, kekhawatiran para kyai pesantren akan tercerabutnya akar kesejarahan pendidikan Islam ala pesantren mulai memperlihatkan indikasinya. Ditambah lagi mulai mudarnya pengkajian khasanah keilmuan klasik secara mendalam yang secara *sanad* dapat dipertanggungjawabkan untuk melahirkan calon-calon yang ahli dalam bidang-bidang tersebut.

Di samping kekhawatiran akan tercerabutnya akar kesejarahan ilmu-ilmu keIslaman atau jejak intelektualisme Islam, munculnya madrasah juga memberi dampak pada kondisi pendidikan nasional. Sejak awal berdirinya, sebagian besar madrasah memang digunakan sebagai penyeimbang – untuk tidak mengatakan melawan – terhadap kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial. Kenyataan tersebut memunculkan stigma negatif bagi dunia pendidikan, yang seolah menghadapkan keduanya pada suatu perbedaan dan pertentangan. Stigma tersebut sepertinya telah menjadi dogma dalam kehidupan masyarakat sejak kemerdekaan belum diraih, bahkan tetap terbawa dan mengakar dalam persepsi masyarakat sampai setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Pasca-kemerdekaan Indonesia, dalam upaya pembangunan nasional yang salah satu fokus garapannya adalah pendidikan, pemerintah dihadapkan pada kenyataan adanya stigma negatif pada dunia pendidikan Indonesia. Adanya dua macam lembaga pendidikan yang oleh masyarakat dianggap berbeda dan bertentangan tentu berpotensi menimbulkan masalah. Meskipun sudah ada sekolah umum yang diakui oleh pemerintah, namun tampaknya mengesampingkan madrasah bukanlah merupakan suatu langkah yang tepat mengingat cukup besarnya juga animo masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Untuk meredam anggapan dikotomik di kalangan masyarakat tersebut, pemerintah mencoba mengatasinya dengan mengeluarkan Kepres No. 34 tahun 1972 tentang penyatuan payung semua lembaga pendidikan dibawah naungan kementerian P&K. Keputusan Presiden (Kepres) tersebut kemudian dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Inpres No. 15/1974 agar Kepres No. 34 Tahun 1972 segera direalisasikan.⁴ Dari situ, dengan berbagai problematika dan dinamika kemudian lahir

⁴Maksum, *Madrasah...*, 146-147.

SKB tiga menteri tentang “Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah” pada tahun 1975. SKB tersebut sebagai tindak lanjut dari Kepres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974 yang intinya bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan di bawah tanggung jawab Menteri Agama dan statusnya setara dengan sekolah-sekolah umum sesuai tingkatannya.⁵

Namun demikian langkah tersebut pada prosesnya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Anggapan dikotomik tetap ada dan “penganaktirian” madrasah menjadi kenyataan baru di lapangan. Madrasah sering kali dianggap sebagai sekolah kelas dua dengan berbagai kekurangannya. Di sisi lain, madrasah juga mulai dianggap kurang mampu mewakili pesantren sebagai penerus dan penjaga jejak intelektualisme Islam serta penjaga moral generasi bangsa. Sebagai kepanjangan tangan pesantren, madrasah tidak cukup mampu menggambarkan tradisi pesantren, terlebih setelah adanya SKB tiga Menteri yang menuntut adanya perubahan orientasi kurikulum madrasah dengan pengurangan muatan pelajaran agama.

Dalam SKB tiga menteri itu, madrasah mendapat predikat sebagai sekolah umum berciri khas Islam. Barangkali itu disematkan karena madrasah tidak lain adalah kepanjangan tangan dari pesantren yang memang dikenal sebagai tempat menimba ilmu-ilmu keislaman pada waktu itu. Namun demikian, penyematan predikat tersebut tidak serta merta diikuti dengan kualitas *output* dari madrasah. Lulusan yang dilahirkan oleh madrasah cenderung tidak maksimal dan dianggap serba tanggung. Sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, madrasah tidak mampu mencetak generasi yang berpengetahuan keagamaan mendalam, dan sebagai sebuah sekolah yang mengajarkan berbagai macam pengetahuan umum, madrasah kurang mampu melahirkan generasi ilmunan yang unggul dalam bidang pengetahuan umum, dalam hal ini pengetahuan yang diajarkan masih cukup rendah dan kurang memadai.⁶

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai macam sebab, mulai dari keprofesionalan guru, kelengkapan sarana dan prasarana belajar di madrasah, serta fasilitas-fasilitas lain yang tidak dapat dipenuhi oleh madrasah. Selain sebab-sebab tersebut, pembagian waktu belajar di madrasah tentu berbeda dengan di sekolah umum karena di dalam madrasah materi keagamaan lebih banyak, sedangkan umumnya waktu

⁵Ibid., 149.

⁶Raharjo, “Madrasah Sebagai The Centre of Excellence,” dalam Ismail, et.al. (ed), *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 227-228.

belajar di sekolah antara sekolah umum dan madrasah hampir sama. Hal yang mungkin lebih parah terjadi pada madrasah yang berada dalam lingkup pesantren, di mana pembelajaran agama dilakukan pada keduanya (pesantren dan madrasah), di mana biasanya materi agama di madrasah lebih dasar atau lebih ringan dari pada materi agama di pesantren. Ini tentu menjadikan waktu belajar peserta didik atau santri kurang efektif karena bisa jadi ada pengulangan pembahasan antara pembahasan materi agama di pesantren dan di madrasah.

B. Pengertian Pondok Pesantren dan Madrasah

1. Pondok Pesantren

Secara umum, pondok pesantren dikenal sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang khusus memberikan pendidikan dan pengajaran tentang ilmu agama Islam. Pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia lahir bersamaan dengan datangnya Islam di Indonesia. Tidak dapat dipastikan kapan pesantren mulai didirikan pertama kali dan di mana tempat pertama kali berdirinya pesantren. Cukup banyak pendapat yang menyebutkan kapan pesantren mulai didirikan dengan berbagai argumentasinya masing-masing. Namun, terlepas dari kapan pondok pesantren pertama kali didirikan, lembaga ini diakui sebagai lembaga pendidikan Islam *indigenous*, yaitu lembaga pendidikan Islam tertua dan paling asli di Indonesia. Selain identik dengan makna keIslaman – karena memang pesantren merupakan lembaga pendidikan yang khusus mengajarkan ilmu agama –, keberadaan pesantren juga identik dengan makna keaslian Indonesia.⁷ Pesantren memiliki peran yang strategis dalam rangka penyebaran Islam pada awal masuknya Islam di Indonesia. Pesantren berfungsi sebagai tempat pendalaman ilmu-ilmu agama sekaligus tempat pengkaderan ulama atau mubaligh sebagai penyebar agama Islam di Indonesia.

Pondok pesantren dapat dimaknai sebagai lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Pondok pesantren merupakan suatu sistem atau lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang lahir jauh sebelum adanya sistem pendidikan lain di Indonesia.⁸

⁷Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010), 3.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), 9.

Metode pengajaran yang lazim digunakan dalam sistem pesantren adalah metode *sorogan* atau *bandongan*. Selain itu, masih ada juga metode dalam bentuk diskusi yang disebut dengan “kelas musyawarah” yang biasanya hanya diikuti oleh santri senior.⁹ Dalam “kelas musyawarah” tersebut dibahas beberapa aspek dalam sebuah kitab yang telah dibacakan oleh seorang guru atau kyai, di antaranya gramatika bahasa dan kandungan isi yang termuat dalam kitab yang bersangkutan.

Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki kekhasan tersendiri bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain seperti sekolah. Dalam pesantren terdapat unsur-unsur yang tidak akan ditemukan dalam sekolah atau lembaga pendidikan lain. Keberadaan unsur-unsur tersebut merupakan elemen penting terhadap berjalannya sistem pembelajaran di pondok pesantren. Umumnya suatu pondok pesantren pasti memiliki unsur-unsur tersebut, namun tentu antara satu pesantren dengan yang lainnya memiliki perbedaan sesuai dengan besar-kecilnya pesantren yang bersangkutan. Unsur-unsur tersebut antara lain masjid, pondok atau asrama, pengajian kitab Islam klasik, santri dan kyai.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, berdasarkan bentuk dan jenis pendidikannya, umumnya pesantren dikenal ke dalam dua kategori, yaitu pesantren salaf/klasik/tradisional dan pesantren khalaf/modern. Dua jenis pesantren itulah yang sekarang ini masyhur dikenal dan sering dijadikan perbandingan antara keduanya. Secara lebih spesifik, Ridlwan Nashir mengklasifikasikan pesantren ke dalam lima jenis, yaitu pondok pesantren salaf/klasik, pondok pesantren semi berkembang, pondok pesantren berkembang, pondok pesantren khalaf/modern.¹¹

Selain itu, pengklasifikasian pesantren juga dapat dilihat dari persentuhannya dengan sistem sekolah. Berdasarkan persentuhan sistem pesantren dengan sistem sekolah, pesantren dapat dikategorikan ke dalam empat tipe, yaitu 1) pesantren yang sepenuhnya dilaksanakan secara tradisional; 2) pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal; 3) pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan santrinya belajar di luar pesantren; dan 4) pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren sekaligus menyelenggarakan sistem sekolah atau madrasah.

⁹Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: LP3ES, 2011), 57-58.

¹⁰Ibid., 79-99.

¹¹M. Ridlwan Nashir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 87.

2. Madrasah

Dalam diskursus pendidikan Islam, istilah madrasah merupakan satu bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari pembahasan. Keberadaannya sudah mengakar dan menjadi istilah khas Islam yang menunjukkan suatu lembaga pendidikan sejak sekian lama. Istilah tersebut ikut tersebar seiring meluasnya pengaruh Islam di belahan dunia, termasuk sampai di Indonesia. Sebagai negara mayoritas muslim, Indonesia juga tidak lepas dari penggunaan istilah madrasah untuk menunjukkan sebuah lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan maksud dalam penyebutan istilah madrasah di Indonesia jika dibandingkan dengan penyebutan istilah tersebut di tempat lain.

Dalam sejarah dunia pendidikan Islam, madrasah menjadi istilah untuk menunjukkan suatu lembaga pendidikan secara umum, di mana di dalamnya terdapat proses pendidikan dan pengajaran yang cukup luas tanpa ada pengkhususan. Hal ini cukup berbeda dengan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, di mana madrasah pada awal berdirinya dikhususkan hanya sebagai tempat pendidikan dan pengajaran agama. Di dalam madrasah pada waktu itu tidak diajarkan pengetahuan selain pengetahuan agama, bahkan madrasah dianggap sebagai lawan atau bentuk penolakan terhadap pendidikan umum. Hal inilah yang membedakan antara madrasah dalam dunia pendidikan Islam secara umum dan madrasah yang ada di Indonesia. Madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum, sedangkan di Indonesia hanya ditujukan untuk sekolah yang mengajarkan pengetahuan agama, dan pada perkembangannya pada sekolah yang pengetahuan agama menjadi dasar atau ciri khasnya.¹²

Sejarah kelahiran dan perkembangan madrasah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pesantren. Madrasah diyakini merupakan kelanjutan dari sistem pesantren yang telah dimodifikasi dan dikembangkan berdasarkan penyelenggaraan sekolah-sekolah umum dengan menggunakan sistem klasikal.¹³ Jika tidak demikian, ia merupakan hasil dari interaksi seseorang terhadap dunia luar dan ketidakpuasan terhadap pola pengajaran yang berlangsung dalam sistem pesantren. Upaya yang dilakukan oleh kaum muslim Indonesia yang telah mendapatkan pengalaman di luar

¹²Haidar Putra Dauly, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001), 59.

¹³M. Ridlwan Nashir, *Mencari Tipologi...*, 90.

Indonesia untuk melakukan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk lembaga madrasah. Semangat pembaharuan ini sedikit banyak disebabkan oleh terjadinya pembaharuan di dunia Islam di Timur Tengah pada waktu itu. Selain itu, umumnya madrasah juga lahir sebagai respon terhadap kebijakan dan sistem pendidikan pemerintah kolonial Belanda.¹⁴

Pada awalnya, istilah madrasah memang identik dengan pendidikan agama tanpa pendidikan umum. Namun pada perkembangannya, madrasah cukup fleksibel untuk memasukkan pendidikan umum ke dalam sistem madrasah. Hal itu berakar pada kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk mengarungi kehidupan di dunia, selain pentingnya pendidikan agama untuk penghayatan beribadah. Sampai saat ini, secara umum dikenal dua jenis madrasah yang ada di Indonesia, yaitu madrasah diniyah yang hanya mengajarkan pendidikan agama dan madrasah dalam artian umum yang selain mengajarkan pengetahuan agama juga mengajarkan pengetahuan umum. Pasca-kemerdekaan Indonesia, madrasah jenis kedua ini mendapat banyak perhatian dari pemerintah, terutama dalam aspek kurikulum. Hal ini dilakukan utamanya untuk memberikan pengakuan kesetaraan pada madrasah dengan sekolah umum, sehingga lulusan madrasah memiliki hak yang sama seperti lulusan sekolah umum.

Munculnya corak-corak madrasah tidak bisa dilepaskan dari berbagai dinamika yang terjadi pada setiap masanya sehingga madrasah muncul dalam jenis yang beragam seperti madrasah umum yang dikelola masyarakat, madrasah yang dikelola pemerintah ataupun madrasah dalam lingkup pesantren. Madrasah dalam hal ini selalu menyesuaikan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi waktu tertentu. Mulai dari masuknya sedikit demi sedikit pengetahuan umum dalam madrasah, sampai dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Peningkatan Kualitas Madrasah sebagai Dasar Penyetaraan Madrasah dengan Sekolah Umum. Banyaknya corak madrasah tersebut mengharuskan adanya penegasan terkait dengan jenis madrasah yang dibahas di sini agar tidak membingungkan. Madrasah yang dimaksud pada pembahasan ini adalah madrasah yang berbasis atau menyatu dalam lingkungan pesantren.

¹⁴Ainurrofiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren* (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005), 34.

C. Konsep Sinergi Pesantren dan Madrasah Sebagai Model Alternatif Pendidikan Islam Indonesia

Lahir dan munculnya madrasah atau sekolah dalam sistem pendidikan pesantren semula dianggap sebagai solusi paling realistis bagi upaya mewujudkan perubahan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang unggul tidak hanya di bidang pengetahuan agama, tetapi juga unggul dalam bidang pengetahuan alam serta *skillfull* dalam bidang penerapan teknologi. Dengan menggabungkan keunggulan atau aspek-aspek yang menonjol dari lembaga pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan sekolah disinyalir akan menjadi jalan keluar bagi dilema keilmuan yang sedang melanda masyarakat Indonesia pasca-kemerdekaan dan terutama dianggap tidak mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung pada waktu itu. Dengan digabungnya dua keunggulan dari dua institusi pendidikan tersebut – pesantren dan sekolah – maka secara otomatis akan melahirkan *output* sumber daya manusia Indonesia yang ulama yang ilmunan atau ilmunan yang ulama, untuk menggambarkan seseorang yang menguasai kompetensi keilmuan agama dan kompetensi keilmuan umum sekaligus. Model pendidikan yang demikian itu kemudian digambarkan atau direpresentasikan dengan lahirnya madrasah dalam sistem pendidikan pesantren.

Penggambaran madrasah atau sekolah dengan sedemikian rupa tersebut memang bukanlah sebuah kekeliruan. Pada masa-masa di mana gencar dikampanyekan pendirian madrasah dalam pesantren, tujuannya memang dimaksudkan untuk keperluan yang sesuai dengan kebutuhan zaman pada waktu itu. Dengan segala kondisi yang ada pada waktu itu, di mana lembaga pendidikan yang ada dan dapat diakses masyarakat luas hanyalah pesantren, dan karena model pendidikan yang berjalan dalam sistem pesantren dirasa tidak cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang ada, maka keluarlah ide untuk mendirikan atau mendiversifikasikan lembaga pesantren tersebut dalam bentuk persekolahan yang masih mempresentasikan nilai-nilai pesantren. Maka kemudian lahirlah madrasah dalam sistem pesantren dan pada perkembangannya banyak diikuti oleh pesantren-pesantren yang lain, selain karena adanya dorongan dari pemerintah pada waktu itu.

Namun kemudian, seiring berjalannya waktu dan dinamika yang menyertai di setiap zamannya, pendidikan madrasah atau sekolah yang ada dalam sistem pesantren

secara perlahan ‘terpisah’ dari sistem awalnya sehingga hari ini dapat dikatakan bahwa madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang berada dalam lingkungan pesantren umumnya ‘terpisah’ baik secara kelembagaan maupun tata kelolanya dengan pesantren. Pesantren dan madrasah/sekolah menjadi domain masing-masing yang pengelolaannya dilakukan oleh aktor-aktor yang berbeda. Dalam hal ini, modernisasi pesantren yang terus berlangsung dengan cepat mengakibatkan efek samping yang tidak ringan, yaitu disorientasi kurikulum pesantren, antara konsisten memegang tradisi, kreatif mengadopsi perubahan atau kombinasi keduanya yang nyatanya tidak menampkakkan kesuksesannya.¹⁵

Hal tersebut tentu menjadikan cita-cita awal dirintisnya madrasah dalam sistem pendidikan pesantren secara perlahan menjadi pudar. Memang benar dengan adanya madrasah aspek seperti kurikulum, relevansi pendidikan serta pengelolaan pendidikan yang lebih terstruktur dan terencana lebih baik dari pada dalam sistem pesantren. Namun barangkali justru ada yang terlewatkan atau tertinggal dari proses transformasi pendidikan tersebut, yaitu substansi atau prinsip dasar pesantren untuk mengajarkan dan melatih siswa atau santri dalam penguasaan ilmu dan nilai-nilai Islam yang justru tidak terakomodasi dengan baik atau tidak terlihat dari institusi modern hasil pembaharuan pesantren. Dengan kata lain, madrasah telah kehilangan orientasi dan akar sejarahnya yang keadaan tersebut justru berperan pada semakin menjamnya dualisme pemaknaan pendidikan.¹⁶

Dinamika perkembangan yang menuntun pada pola yang tidak sinergis-integratif antara pesantren dan madrasah ini terjadi di hampir semua tempat. Umumnya pesantren-pesantren ini mengklasifikasikan sistem pendidikan yang mereka selenggarakan dengan label integratif ataupun terpadu. Bagaimanapun, pelabelan integratif ataupun terpadu tersebut merupakan bagian dari “*marketing product*” untuk menarik minat masyarakat luas, meskipun pelabelan tersebut juga tidak sepenuhnya salah ataupun nihil dalam prakteknya. Setidak-tidaknya, label integratif atau terpadu tersebut menggambarkan dari penyelenggaraan pendidikan formal, di mana siswanya sekaligus diharuskan menginap atau tinggal di pondok pesantren. Dengan pola pendidikan yang demikian, maka label

¹⁵Jamal Ma'mur Asmani, *Peran Pesantren dalam Kemerdekaan dan Menjaga NKRI* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), xi.

¹⁶Ainurrofiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah...*, hlm. 23.

integratif ataupun terpadu dianggap telah cukup terwakili walaupun dalam lingkup yang sangat kecil.

Dalam pandangan penulis, pola-pola pendidikan gabungan antara sistem pesantren dan sistem sekolah formal seperti di atas tidak sepenuhnya menggambarkan suatu yang integratif atau terpadu, apalagi sinergis. Meski penyempurnaan-penyempurnaan tentu juga dilakukan, namun secara garis besar terdapat pola hubungan yang menghendaki atau bahkan mengharuskan sistem pesantren dan sistem sekolah formal tidak dapat menyatu dalam satu konsep dan sistem pendidikan yang sinergis-integratif. Dengan kata lain, walaupun secara zahir baik sistem pesantren maupun sistem pendidikan formal tampak menyatu, namun secara substansial dua institusi ini memiliki “jiwa” atau “ruh” masing-masing. Sistem pendidikan pesantren tetap dengan “ruh”nya sebagai lembaga tradisional dan sistem pendidikan formal yang konsisten dengan “ruh”nya untuk memenuhi tuntutan formalitas.

Pada kenyataannya, telah banyak pesantren yang menyelenggarakan pola pendidikan terpadu sebagaimana konsepsi di atas. Namun tidak berlebihan jika dikatakan secara umum sampai saat ini belum ada pesantren dengan pola pendidikan terpadu tersebut yang bagus dalam bidang pendidikan ilmu umum sekaligus bagus dalam bidang pendidikan ilmu agama. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa apa yang disebut dengan pesantren dengan konsepsi ini hanyalah merupakan asrama tempat siswa menginap, atau bahkan mungkin lebih kepada sekolah berasrama (*boarding school*).¹⁷

Tidak sinergisnya pengelolaan dua lembaga ini (pesantren dan madrasah) dapat dilihat terutama dari penerapan kurikulumnya. Meskipun dilabeli dengan sistem terpadu, penerapan kurikulum di dalamnya dijalankan masih dengan pola yang parsial, pesantren dengan kurikulumnya sendiri dan pendidikan formal dengan kurikulumnya sendiri. Di beberapa tempat bahkan menambahkan muatan kurikulum dengan mata pelajaran keagamaan pada sistem pendidikan formal dengan alasan-alasan tertentu. Padahal, kurikulum pendidikan madrasah umumnya sudah “*over capacity*” dibandingkan dengan kurikulum sekolah umum dengan jumlah mata pelajaran agama yang lebih banyak.

¹⁷Salahuddin Wahid, *Transformasi Pesantren Tebuireng: Menjaga Tradisi di Tengah Tantangan* (Malang: UIN Malang Press, 2011), 133-134.

Adanya jumlah mata pelajaran agama yang lebih banyak dalam kurikulum nasional seharusnya diikuti dengan penambahan jam belajar bagi siswa madrasah antara 10-14 jam setiap minggunya. Sehingga, meskipun beban mata pelajaran pada madrasah lebih banyak, namun dengan tersedianya waktu belajar yang cukup, maka kualitas lulusan madrasah diprediksi akan lebih bagus di bidang keagamaannya dan mampu bersaing di bidang keilmuan umum.¹⁸ Namun kenyataannya, jumlah jam pelajaran pada madrasah umumnya masih sama, dengan sedikit memangkas jatah jam pelajaran untuk materi pengetahuan umum. Ironisnya, di beberapa madrasah atau sekolah yang berbasis di pesantren, alokasi waktu pembelajaran yang sudah tidak berpihak pada siswa tersebut masih harus ditambah dengan beberapa jenis mata pelajaran, seperti kitab kuning dan lain-lain. Hal ini tentunya secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pembelajaran pada semua mata pelajaran dan khususnya pada materi-materi ilmu alam.

Di sisi lain, sebagaimana disebut di atas, pola pengelolaan dua lembaga ini umumnya masih mengedepankan “ruh”nya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari keharusan madrasah atau sekolah (termasuk yang berbasis di pesantren) untuk menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum nasional secara menyeluruh. Artinya, pendidikan agama dalam kurikulum nasional (yang bahkan di beberapa tempat masih diberi tambahan) harus diterapkan secara mutlak karena terkait dengan berbagai aspek yang menggambarkan formalisme. Sementara itu, dalam sistem pesantren, umumnya juga diajarkan materi-materi keagamaan yang hampir sama atau bahkan lebih tinggi muatan kontennya. Hal ini, menurut penulis, merupakan bentuk tumpang-tindih kurikulum dalam konsepsi lembaga terpadu/integratif yang membuang-buang waktu. Menurut hemat penulis, tumpang-tindih kurikulum yang membuang-buang waktu ini seharusnya bisa diefektifkan dengan pola pendidikan yang sinergis-integratif antara pesantren dan madrasah/sekolah, sehingga penguasaan akan pengetahuan agama maupun pengetahuan umum dapat lebih dimaksimalkan.

Madrasah atau sekolah yang dari sisi kelembagaan terintegrasi secara terbatas dengan pesantren memiliki peluang untuk mensinkronkan program-program pendidikan yang dimiliki. Dengan adanya pesantren, peluang siswa sekolah atau madrasah untuk mendapat pelajaran agama yang lebih dalam dan luas terbuka lebar, begitu pula

¹⁸Dede Rosyada, *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan di Era Otonomi Daerah* (Depok: Kencana, 2017), 24.

kesempatannya untuk mensekusi pengetahuan alam di sekolah. Dengan sistem pembelajaran agama yang ada di pesantren, maka sesungguhnya tidak perlu lagi ada pembelajaran agama di sekolah, tentu apabila konsep pendidikan yang integratif-sinergis telah terwujud. Jangan sampai keberadaan pesantren dianggap hanya sebagai aspek atau komponen penunjang bagi pelaksanaan pendidikan sekolah formal baik itu madrasah atau sekolah umum yang berada di lingkungan pesantren.

Peluang dan kesempatan untuk menciptakan pendidikan non – dikotomik – dalam artian adanya penekanan yang sama antara ilmu umum dan ilmu agama – sangat terbuka lebar dalam integrasi kelembagaan sekolah/madrasah dan pesantren. Melalui lembaga integrasi tersebut, peserta didik akan mendapatkan pembelajaran yang sama baiknya antara ilmu umum dan ilmu agama, sehingga akan berpengaruh pada kualitas kehidupannya di masa yang akan datang. Pesantren memiliki keunggulan sistem dalam urusan pendidikan agama yang tidak dimiliki oleh sekolah atau madrasah. Sedangkan sekolah atau madrasah biasanya cenderung mengejar penguasaan ilmu alamnya, meski kadang madrasah cukup jauh tertinggal. Dengan memanfaatkan keunggulan keduanya melalui pembangunan sistem yang sinergis-integratif, maka diharapkan kualitas *output* lulusannya benar-benar menjadi manusia seutuhnya, seorang muslim dan hamba yang *kamil* serta seorang khalifah Allah yang mumpuni.

Konseptualisasi sistem yang sinergis-integratif antara pesantren dan madrasah menuntut adanya rekonstruksi sistem pendidikan secara komprehensif. Rekonstruksi tersebut harus dilakukan dalam kerangka manajemen pendidikan yang efektif, mulai dari pola pengelolaan, kurikulum, sarana dan prasarana serta penilaian. Semua harus dilakukan dalam kerangka manajemen yang integral, menyatu serta dengan ruh atau semangat yang universal. Ini harus dilakukan karena selama ini yang menjadikan kedua lembaga pendidikan ini (madrasah dan pesantren) tidak sinergis adalah pola manajemen yang terpisah, parsial dan berjalan dengan “ruh”nya masing-masing.

Secara lebih detail pada level konseptual, rekonstruksi sistem pendidikan yang sinergis-integratif tersebut dapat dilihat pada pemaparan berikut:

1. Manajemen Pengelolaan

Pertama-tama yang patut menjadi perhatian adalah sistem pengelolaan. Selama ini, pengelolaan dua lembaga ini cenderung terpisah dan berjalan sendiri-sendiri. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, masing-masing lembaga memiliki “ruh” sendiri

dan memiliki arah perjuangan sendiri. Meskipun ada aspek-aspek yang bersinggungan, namun pengelolaannya cenderung dengan semangat dan tata cara yang berlainan. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan konsekuensi dari pola pengelolaan pendidikan di Indonesia yang tidak terpadu. Di level kementerian misalnya, pendidikan berada di bawah payung dua kementerian, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dan Kementerian Agama. Adanya dua pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ini secara tidak langsung sebenarnya mempertegas garis perbedaan pendidikan dengan basis umum dan basis agama. Kalaupun dikatakan pesantren dan madrasah sama-sama berada di bawah naungan Kementerian Agama, tidak terpadunya pola pengelolaannya tetap dapat dilihat dari adanya direktorat pada masing-masing dua lembaga tersebut. Namun demikian, yang senyatanya menjadi persoalan pada pembahasan di sini adalah pola pengelolaan yang tidak terpadu antara madrasah dan pesantren pada level operasional-teknis.

Hampir di setiap pesantren yang ada lembaga formal di dalamnya, pengelolaan pendidikan di antara keduanya dilakukan secara terpisah atau setidaknya menunjukkan sesuatu yang tidak sinkron. Hal ini dipengaruhi oleh adanya ruh atau semangat yang memunculkan anggapan berbeda terkait dengan tujuan kedua lembaga ini. Pengelolaan secara profesional umumnya hanya diterapkan pada lembaga formal, sedang pesantren dikelola ala kadarnya. Di banyak tempat, lembaga pendidikan formal mendapat prioritas yang lebih tinggi sedangkan pesantren terkadang hanya dianggap sebagai pelengkap saja tanpa ada keterkaitan dengan sistem pendidikan yang berjalan di lembaga formal.

Model pengelolaan yang semacam ini kiranya perlu diperbaiki dan dikembangkan ke arah yang lebih baik. Terlebih lagi jika dilihat dari perspektif sejarah, pesantren dan madrasah pada dasarnya mempunyai keterkaitan yang erat serta memiliki tujuan yang sama. Pengelolaan yang terpadu yang mencerminkan semangat sinergis-integratif antar keduanya diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan seimbang. Hal ini dapat tercapai apabila pengelolaan kedua lembaga ini berada dalam satu konsep yang integral, tidak ada pembeda-bedaan (dikotomi) antara pesantren dan madrasah baik dari segi prioritas, tujuan serta ruh atau semangat pengelolaannya. Dengan kata lain, pengelolaan pesantren dan madrasah harus berada dalam satu

framework, dilihat sebagai gabungan institusi yang integral dan mempunyai tujuan yang sama.

Pada level operasionalnya, lembaga integral ini bisa dipimpin oleh satu atau lebih pemimpin, atau satu pemimpin dengan manajer di masing-masing lembaga. Namun yang perlu ditekankan adalah keduanya harus berjalan secara bersama, dengan semangat yang sama serta satu tujuan yang sama. Dengan begitu, sistem pendidikan yang terwujud adalah sistem yang seimbang dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Pendidikan dengan sistem sekolah berjalan dan dengan sistem pesantren atau madrasah diniyah (madin) juga berjalan dalam kerangka konseptual yang utuh. Tidak ada lagi rasa iri dan kecemburuan karena salah satunya menjadi prioritas dan yang lain terabaikan. Tidak ada lagi salah satu di antara keduanya harus mengikuti ritme salah satu yang lainnya, keduanya berjalan dengan ritme yang sama dan sinergis.

2. Kurikulum

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah kurikulum lembaga terpadu ini. Untuk mewujudkan sistem yang sinergis-integratif, maka kurikulum yang diterapkan harus juga merupakan satu kesatuan yang dijalankan berdasarkan kesatuan tujuan integral. Adapun yang terjadi selama ini adalah sekolah formal berjalan dengan kurikulumnya sendiri (kurikulum nasional) dan pendidikan di pesantren berjalan dengan kurikulumnya sendiri. Bahkan seringkali terjadi adanya “pemaksaan” kurikulum pesantren pada kurikulum sekolah formal hanya untuk mendapatkan perhatian dan antusias peserta didik karena juga menjadi aspek yang dinilai untuk menentukan hasil akhir. Selain itu dari sisi konten sebagaimana dipaparkan sebelumnya, khususnya dalam hal materi agama, terjadi tumpang tindih antara kurikulum di pesantren dan kurikulum di sekolah formal.

Perencanaan kurikulum yang integratif dan mutualis antara lembaga pesantren dan madrasah harusnya diarahkan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tumpang tindih materi pembelajaran yang ada di dalam sistem pendidikan tersebut. Sebagai sebuah sistem pendidikan yang integral, tumpang-tindih kurikulum – khususnya kurikulum agama – antara di pesantren dan di madrasah harusnya dapat diminimalisir untuk kemudian diefektifkan agar tidak ada pembuangan waktu yang sia-sia. Pengefektifan kurikulum agama tersebut dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan penguasaan siswa terhadap kurikulum atau materi yang lain,

khususnya pada pengetahuan alam dan teknologi. Dengan begitu, siswa atau santri dapat belajar dengan maksimal materi pembelajaran yang ada, baik pada pengetahuan umum maupun pengetahuan agama.

Perencanaan kurikulum tersebut secara tidak langsung menghendaki adanya “pemisahan” domain ajar dalam pesantren atau madrasah. Kata pemisahan tersebut dipakai hanya sebagai penjelas terhadap apa yang harus dimasukkan dalam domain madrasah dan apa yang harus dimasukkan dalam domain pesantren sebagai sebuah institusi yang integral. Pesantren sebagai sebuah lembaga yang telah terbukti secara nyata dan menyakinkan dalam melahirkan generasi-generasi yang mumpuni dalam urusan agama sepatutnya diberikan tanggung jawab untuk mengelola domain agama dalam kurikulum integral tersebut. Sedangkan madrasah, sebagai institusi yang dari awalnya memang didesain untuk memberikan pengetahuan umum, diamanatkan untuk mengelola domain pengetahuan umum tanpa harus ikut merepotkan diri dan menghabiskan waktu untuk mengelola domain agama yang telah dipegang oleh pesantren. Dengan begitu, proses pembelajaran integratif yang sinergis dan mutualis antara pesantren dan madrasah akan tercipta dengan harmonis.

Sejauh ini, di banyak madrasah yang berbasis pada pesantren, pengelolaan pendidikan agama cenderung tumpang-tindih, dimana pembelajaran agama yang secara jelas menjadi domain dari pesantren, juga diajarkan di madrasah. Hal ini tentunya merupakan sebuah pemborosan waktu, karena selain adanya sebuah pengulangan, materi agama antara dua institusi tersebut umumnya memiliki tingkatan yang berbeda. Dan sayangnya, umumnya pembelajaran agama yang dilakukan di madrasah hanya mengulang apa yang telah diajarkan di pesantren. Bahkan apa yang diajarkan di pesantren telah jauh lebih tinggi tingkatannya dari pada yang diajarkan di madrasah. Hal ini menjadi peluang bagi pengefektifan dan optimalisasi pembelajaran agama.

Dengan implementasi kurikulum integral yang sinergis, maka tumpang tindih sebagaimana yang terjadi selama ini akan dapat dihilangkan. Namun begitu, perencanaan kurikulum ini harus benar-benar mencerminkan suatu yang menyatu serta penekanan yang seimbang. Kurikulum tersebut harus berjalan bersama, kurikulum pembelajaran materi umum tidak bisa diterapkan jika kurikulum pembelajaran materi agama tidak dijalankan, begitu pula sebaliknya. Dengan adanya pemisahan domain seperti dijelaskan sebelumnya, maka implementasi kurikulum integral ini seharusnya

tidak mustahil untuk dijalankan. Yang perlu mendapat perhatian adalah pada pembelajaran di pesantren yang harus lebih ditingkatkan mutunya baik melalui *upgrade*-an metode pengajaran, stratifikasi kelas dan materi serta penilaian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian pada sekolah formal. Jika dirasa perlu, dapat pula materi-materi keagamaan yang diajarkan di pesantren disesuaikan dengan tema-tema yang dianggap perlu dan lebih bermanfaat.

3. Evaluasi dan Penilaian

Di antara aspek yang ikut menentukan dalam konsepsi pendidikan yang sinergis-integratif dalam gabungan lembaga pesantren dan madrasah sebagai lembaga yang integral ini adalah sistem evaluasi dan penilaian. Sebagaimana yang diketahui bahwa selama ini evaluasi dan penilaian dari kedua lembaga ini yang berjalan secara parsial dan terpisah memiliki implikasi yang berbeda. Madrasah sebagai lembaga formal menerapkan evaluasi dan penilaian yang ketat karena memiliki daya tekan pada kebergunaan hasil penilaian pada masa yang akan datang. Sedangkan pesantren yang merupakan lembaga nonformal umumnya menerapkan sistem evaluasi dan penilaian dengan lebih longgar atau bahkan tanpa keduanya karena tidak ada pengaruhnya atau terkadang dianggap tidak terlalu bermanfaat. Bahkan pesantren-pesantren yang menerapkan evaluasi dan penilaian yang ketat-pun, hasilnya secara formal juga tidak terlalu diakui. Akhirnya, hasil evaluasi dan penilaian tersebut hanyalah berupa secarik kertas yang tidak terlalu bermanfaat bagi kehidupan pemiliknya.

Hal itu secara tidak langsung berdampak pada semangat belajar peserta didik untuk mengejar formalitas ijazah dan sedikit mengabaikan yang tidak memiliki nilai formal. Dalam kasus madrasah atau sekolah, peserta didik dan juga pengajar sama-sama memberikan prioritas yang tinggi pada mata-mata pelajaran yang menjadi materi ujian nasional dan mengabaikan materi yang tidak diujikan nasional, termasuk mata-mata pelajaran agama. Formalisme-formalisme yang seperti ini sayangnya sudah menjangkiti kehidupan secara umum dan nyaris tidak dapat dibendung. Namun demikian, meski selama ini penentuan kelulusan didasarkan pada nilai ujian mata pelajaran yang diujikan, menurut pandangan peneliti lembaga pendidikan tertentu dapat menentukan atau melakukan improvisasi pada syarat-syarat kelulusan seorang peserta didik. Di sinilah peluang lembaga integral dalam konsepsi peneliti untuk melakukan evaluasi dan penilaian pembelajaran.

Jika membendung arus formalisme hampir mustahil untuk dilakukan, maka bukanlah sebuah kesalahan jika sebuah lembaga pendidikan menciptakan konsepsi-konsepsi untuk mengimbangi formalisme tersebut. Konsepsi tersebut maksudnya adalah membuat kebijakan-kebijakan di tingkat lembaga terkait dengan syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh seorang peserta didik, selain dari hasil nilai ujian nasional. Dengan demikian, implementasi dan penekakan penerapan kurikulum pun dapat dilakukan secara seimbang pada lembaga integral tersebut.

Evaluasi dan penilaian pada lembaga integral ini dapat bervariasi bentuknya, terutama terkait dengan materi-materi agama. Evaluasi dan penilaian yang selama ini umumnya hanya dapat mengakomodasi aspek kognitif saja, dapat dikembangkan hingga mampu mengakomodasi aspek afeksi dan psikomotor. Dalam lembaga integral, hal ini tentu sangat memungkinkan karena selama ini konsep tersebut telah berjalan. Kalaupun perlu adanya penyempurnaan, maka penyempurnaan itu dapat dilakukan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan yang terprogram dan teratur.

Konsepsi evaluasi dan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh dan proporsional ini juga sekaligus menggambarkan gubungan yang saling melengkapi antara sistem madrasah dan sistem pesantren. Persentase penilaian yang diberikan harus sama sehingga dua-duanya memiliki pengaruh sama terhadap kelulusan serta memiliki daya tekan yang sama pula. Jika sudah demikian, maka tidak ada lagi peserta didik maupun guru yang mengabaikan atau menyepelekan mata pelajaran tertentu. Hasil paling akhir yang diharapkan adalah terciptanya *output* pendidikan yang seimbang dalam penguasaan ilmu pengetahuan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum, sehingga mimpi untuk memiliki seorang ulama yang ilmunan dan ilmunan yang ulama dalam jumlah yang besar dapat benar-benar terwujud.

D. Simpulan

Konseptualisasi lembaga pendidikan Islam yang integratif sekaligus sinergis antara pesantren dan madrasah mengisyaratkan perlunya evaluasi serta rekonstruksi terhadap sistem yang telah berjalan. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki masing-masing oleh pesantren dan madrasah, mensinergikan kedua lembaga ini menjadi jalan yang paling efektif untuk mewujudkan *output* pendidikan yang berkualitas baik dalam bidang pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Proses ini juga sekaligus

mampu menunjukkan bahwa baik pendidikan agama maupun pendidikan umum dapat dijalankan bersama dalam bingkai yang sinergis. Dengan demikian, secara perlahan anggapan dikotomi ilmu pengetahuan yang telah lama mengakar akan dapat dihilangkan.

E. Daftar Pustaka

- Asmani, Jamal Ma'mur. *Peran Pesantren dalam Kemerdekaan dan Menjaga NKRI*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Daulay, Haidar Putra. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001.
- Dawam, Ainurrofiq, dan Ahmad Ta'arifin. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003.
- Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: LP3ES, 2011.
- Ismail, et.al. (ed). *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Lukens-Bull, Ronald. "Teaching Morality: Javanese Islamic Education in a Globalizing Era." *Journal of Arabic and Islamic Studies* 3 (2000).
- _____. *A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and Modernity in Muslim Java*. New York: Palgrave MacMillan, 2005.
- _____. "Madrasah By Any Other Name Pondok, Pesantren, and Islamic School in Indonesia and Southeast Asian Region." *Jurnal of Indonesian Islam*, Vol. 04, No. 01 (2010).
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010.
- Maksum. *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mutohar, Ahmad, dan Nurul Anam. *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nashir, M. Ridlwan. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rosyada, Dede. *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Depok: Kencana, 2017.
- Saridjo, Marwan. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bhakti, 1982.

- _____. *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Bogor: Al Manar Press, 2011.
- Shidiq, Rohani. *Gus Dur: Penggerak Dinamisasi Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Wahid, Salahuddin. *Transformasi Pesantren Tebuireng: Menjaga Tradisi di Tengah Tantangan*. Malang: UIN Malang Press, 2011.
- Yasmadi. *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. IV. Mutiara Sumber Widya, 1995.
- Zayadi, Ahmad, et.al. *Desain Pengembangan Madrasah*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2005.